

## PENYIAPAN SDM KONSTRUKSI DALAM RANGKA AKSELERASI IMPLEMENTASI BIM

Disampaikan Oleh: Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi



1

**PENDAHULUAN** 

**OUTLINE** 

REGULASI PEMANFAATAN BIM

KEBIJAKAN PEMANFAATAN BIM DI KEMENTERIAN PUPR

UPAYA AKSELERASI IMPLEMENTASI BIM



## Tantangan Pembangunan Infrastruktur



Jumlah anggaran dan/atau paket pekerjaan meningkat

Pembangunan infrastruktur semakin kompleks

Percepatan dan transparansi pembangunan infrastruktur

Memerlukan metode baru dan teknologi sebagai pendorong percepatan dan transparansi dalam penyelenggaraan infrastruktur yang semakin kompleks

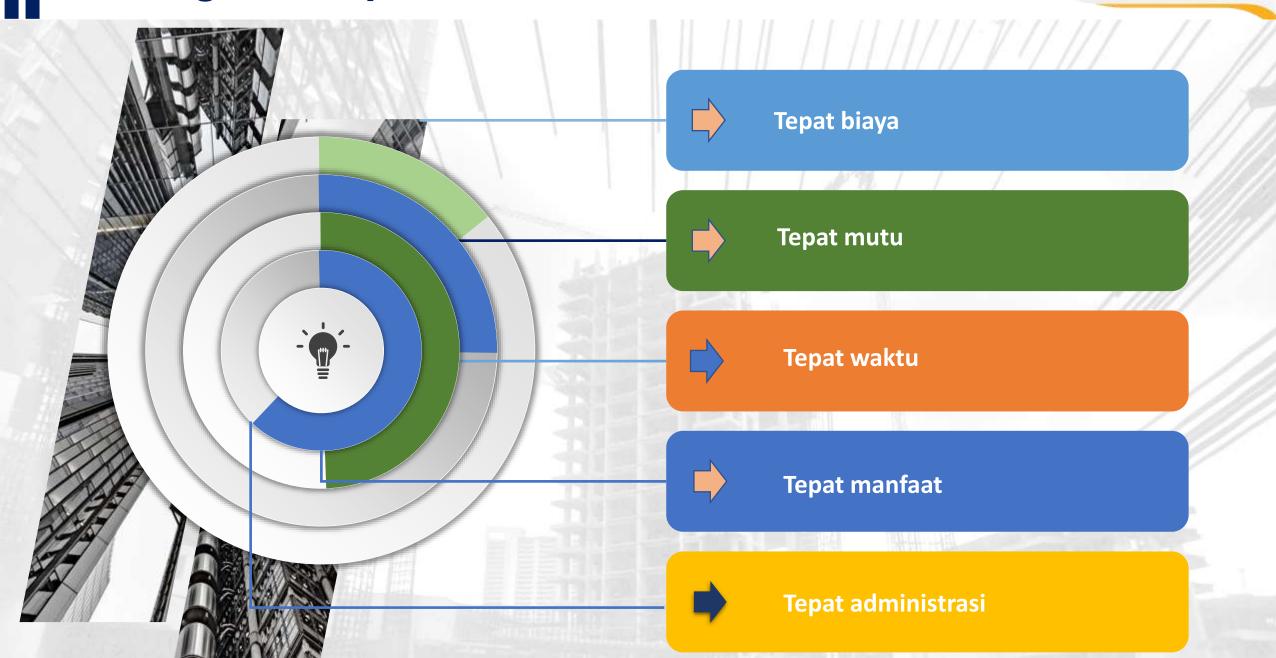
SDM yang mumpuni, berdaya saing, dan tanggap terhadap dinamika inovasi, serta dapat mengoptimalkan penggunaan inovasi secara berkelanjutan

Pemanfaatan Teknologi untukTransformasi Digital

data yang konsisten dan akurat dari berbagai stakeholder dalam proyek konstruksi akan digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan (based-on-data decision making)

## Tantangan Penyediaan Infrastruktur Nasional





## ARAHAN MENTERI PUPR

Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc

Pemanfaatan teknologi harus memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur, bukan sekedar ikut-ikutan atau mengikuti tren sesaat. Industri 4.0 hanya instrumen, justru dibelakangnya harus ada Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal.

Disampaikan pada Kegiatan "Upaya Perluasan Penerapan BIM pada Pembangunan Infrastruktur PUPR", pada Maret 2021.





"Metode yang mengintegrasikan model virtual berikut data teknisnya dan mensimulasikan seluruh informasi pada sebuah proyek pembangunan kedalam model 3 dimensi."

Building Information
Modelling (BIM)





- Peningkatan transparansi & akurasi perhitungan
- Meminimalisir risiko proyek (perencanaan hingga pelaksanaan)



Kehandalan
Infrastruktur &
Peningkatan Daya
Saing Infrastruktur





Ref. http://binmlcom

## PEMANFAATAN BIM PADA SEKTOR KONSTRUKSI



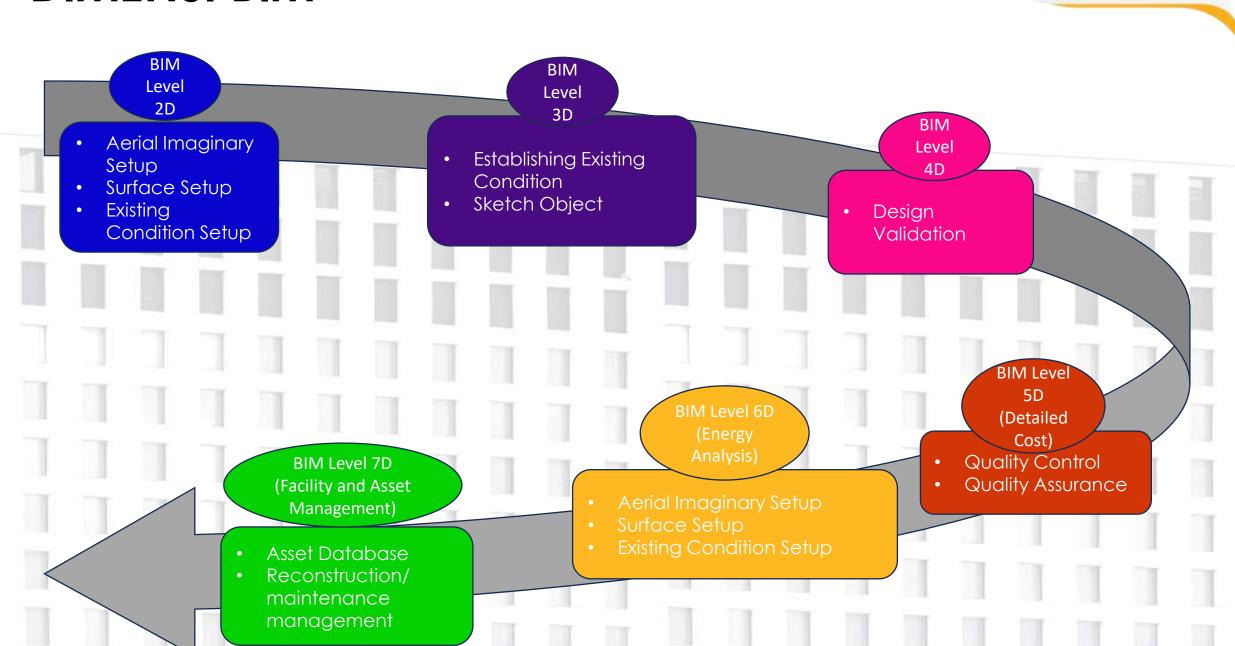
- Building Information Modelling (BIM) memungkinkan desainer dan pelaksana untuk berkolaborasi dari jarak jauh, memberikan fleksibilitas bernilai besar.
- Penerapan BIM berkomitmen membantu dalam melakukan transformasi digital dan untuk mendorong pemanfaatan solusi digital dalam sektor konstruksi.

BIM tidak hanya dipandang sebagai aplikasi namun sebuah system pada setiap tahapan, sehingga JANGAN TERJEBAK pada Aplikasi



## **DIMENSI BIM**

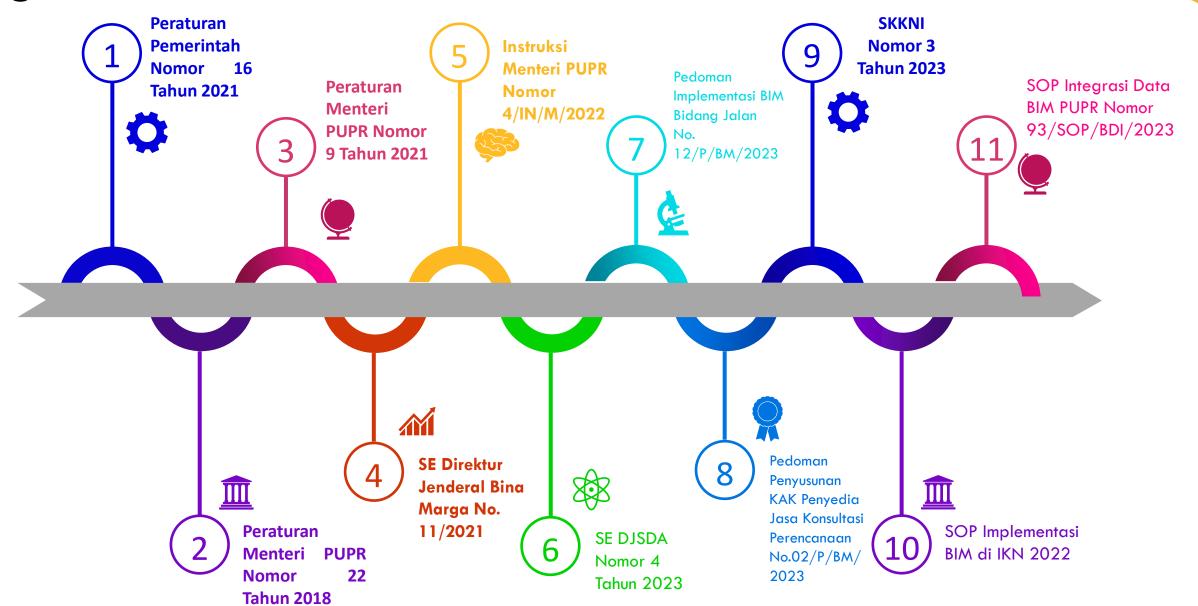






## Regulasi BIM





## REGULASI BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM)



PP No. 16 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PUPR No. 22 Tahun 2018:

Penggunaan *Building Information Modelling* (BIM) wajib diterapkan pada BGN tidak sederhana dengan kriteria luas di atas 2.000 m2 dan di atas 2 lantai



- 3) Padat modal, dengan kriteria pekerjaan:
  - a) Bangunan pencakar langit dan super tinggi;
  - b) Teknologi dan risiko tinggi;
  - c) Bahan bangunan khusus;
  - d) Memerlukan peralatan khusus dan canggih;
  - e) Wajib menggunakan BIM sampai dimensi kedelapan; dan
  - f) Dilakukan oleh penyedia jasa klasifikasi besar dengan melibatkan *quantity surveyor* dan manajemen proyek, dan manajemen konstruksi.

- 2) Padat teknologi, dengan kriteria pekerjaan:
  - a) Bangunan bertingkat menengah dan tinggi;
  - b) Teknologi tidak sederhana dan risiko tinggi;
  - c) Bahan bangunan non standar;
  - d) Memerlukan peralatan mekanik dan elektrik;
  - e) Wajib menggunakan BIM paling sedikit sampai dimensi kelima; dan
  - f) Dilakukan oleh penyedia jasa paling sedikit klasifikasi menengah dengan melibatkan *quantity surveyor* dan manajemen konstruksi.

## REGULASI BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM)





MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

#### PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/PRT/M/2018 TENTANG

PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

4enimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 5 ayat (6), Pasal 7 ayat (4), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (13), Pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (6), dan Pasal 19 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, periu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

tengingar

- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
- Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

### **LAMPIRAN PERMEN PUPR NOMOR 22/PRT/M/2018**

Penggunaan *Building Information Modelling* (BIM) wajib diterapkan pada **Bangunan Gedung Negara tidak sederhana dengan kriteria luas diatas 2000 m2** (dua ribu meter persegi) dan diatas 2 (dua) lantai. Keluaran dari perancangan merupakan hasil desain menggunakan BIM untuk:

- a. gambar arsitektur
- b. gambar struktur
- c. gambar utilitas (mekanikal dan elektrikal)
- d. gambar lansekap
- e. rincian volume pelaksanaan pekerjaan
- f. rencana anggaran biaya

JDIH Kementerian PUPR

## Permen PUPR No. 9 Tahun 2021



### Tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan

## Pasal 6 ayat (3)

Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan dilakukan secara terpadu dan efisien dengan memperhatikan:

- a. Prinsip Konstruksi Ramping; dan/atau
- b. Penggunaan teknologi pemodelan informasi bangunan (*Building Information Modelling*)

## Lampiran Permen PUPR No. 9 Tahun 2021

- a. BIM digunakan sebagai basis pengambilan keputusan dalam proses perencanaan, pelaksanaan konstruksi dan masa operasi bangunan serta masa pembongkaran dan pembangunan kembali
- b. Prinsip penerapan BIM: (1) Informatif; (2) Interoperability; (3) Kolaboratif; (4) Keberlanjutan
- c. Pemodelan bangunan: (1) Perancangan/desain bangunan dengan menggunakan aplikasi/software yang dapat digunakan untuk menghasilkan dan/atau memanfaatkan model tiga dimensi (3D) sebagai dasar pembuatan informasi pada setiap tahapan pembangunan fisik yang memenuhi prinsip penerapan BIM; (2) Terhadap model 3D dapat dilakukan clash detection serta analisis energi, efisiensi material, dan analisis keberlanjutan lainnya
- d. Kolaborasi dan Koordinasi melalui Common Data Environment (CDE): (1) CDE adalah platform digital yang menjadi pusat sumber informasi dan pertukaran informasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan informasi digital untuk seluruh tim proyek; (2) CDE harus memiliki kemampuan untuk membuka model 3D dalam bermacam format file; (3) CDE mempunyai fitur kontrol akses



## RENCANA IMPLEMENTASI DIGITALISASI



Kementerian PUPR secara <u>resmi</u> mulai mengadopsi BIM dalam pembangunan infrastruktur pada Tahun **2017**.

Berbagai kebijakan (*Affirmative Policy*) dibentuk dalam rangka mendukung *Roadmap* Konstruksi Digital Indonesia 2017-2024, yang meliputi 4 (Empat) *milestones*, yaitu:

### **ADOPSI**

### **DIGITALISASI**

### **KOLABORASI**

### **INTEGRASI**

- Adopsi BIM pada semua stakeholder konstruksi;
- Penyusunan Standard BIM Nasional (SNI);
- BIM sebagai Standar
   Kurikulum dan Kompetensi
   (SKKNI) untuk Universitas &
   Asosiasi Profesi.

- Perizinan konstruksi secara digital (OSS/SKKK Online);
- Monitoring dan supervisi konstruksi secara digital (VR, AR, Drone, Internet of Things, dan sebagainya);
- Dimulainya pasar digital untuk sektor kontrusi (material, alat, jasa, dan sebagainya).

- Standar aturan terkait kolaborasi pada Industri konstruksi;
- Implementasi VDC (konstruksi Virtual) dan Lean Construction sebagai dasar dari kolaborasi;
- Implementasi BIM mulai 3D sampai dengan 7D (Operation& Maintenance).

- Implementasi Cloud Construction Management;
- Integrasi sistem proses konstruksi (perizinan, claim, commisioning, handover, dll).

# ARAHAN PRESIDEN DALAM PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA





IKN sebagai **playground**dalam optimalisasi implementasi
digitalisasi 4.0

□ Konsep pembangunan IKN berupa smart forest city sehingga dikelola dengan teknologi modern.

Count Scient Visit

# ARAHAN MENTERI DALAM PENYIAPAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IKN DENGAN BIM



- 01
- Arahan Bapak Menteri untuk segera menyiapkan paket-paket tender kegiatan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) dengan metode Building Information Modelling (BIM).
- 02
- Penerapan BIM dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur merupakan penjabaran arahan Bapak Presiden RI untuk mendorong budaya dan cara kerja di IKN. Dengan diterapkannya BIM, diharapkan dapat mempermudah koordinasi dan integrasi lintas sektor, meningkatkan efisiensi proyek, mempermudah pengendalian pelaksanaan konstruksi s/d serah terima dan pemanfaatan asset oleh Otorita IKN.
- 03

Tuntutan terhadap kesiapan ASN PUPR khususnya level teknis maupun eksekutif dan SDM PBJ yang akan mengelola kegiatan pembangunan infrastruktur di IKN, selain **memiliki kompetensi teknis, juga memahami metode BIM.** 

04

Mendorong Penyedia Jasa untuk melakukan **peningkatan kapasitas penguasaan BIM**, terutama yang akan berpartisipasi pada pembangunan infrastruktur PUPR di IKN.

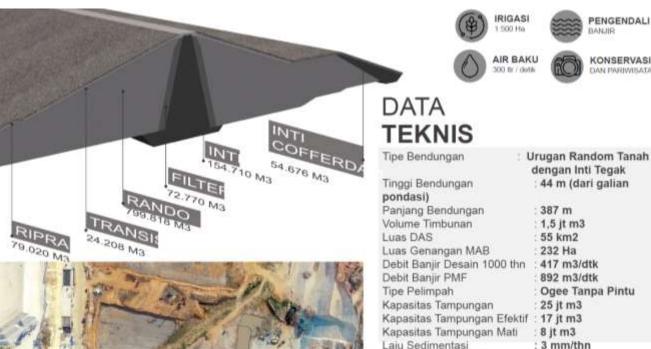
05

Memberikan **peningkatan kompetensi bagi calon tenaga kerja konstruksi** di wilayah Kalimantan khususnya untuk bidang Building Information Modelling (BIM)

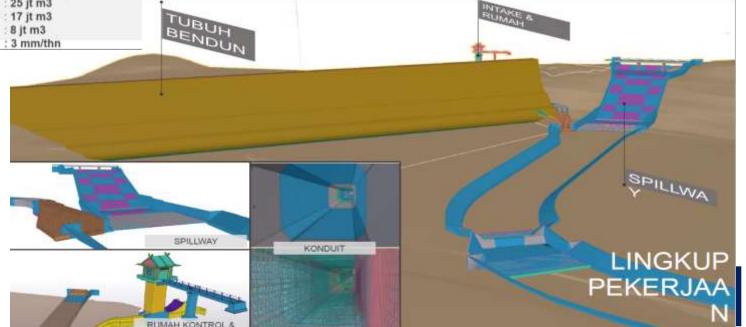


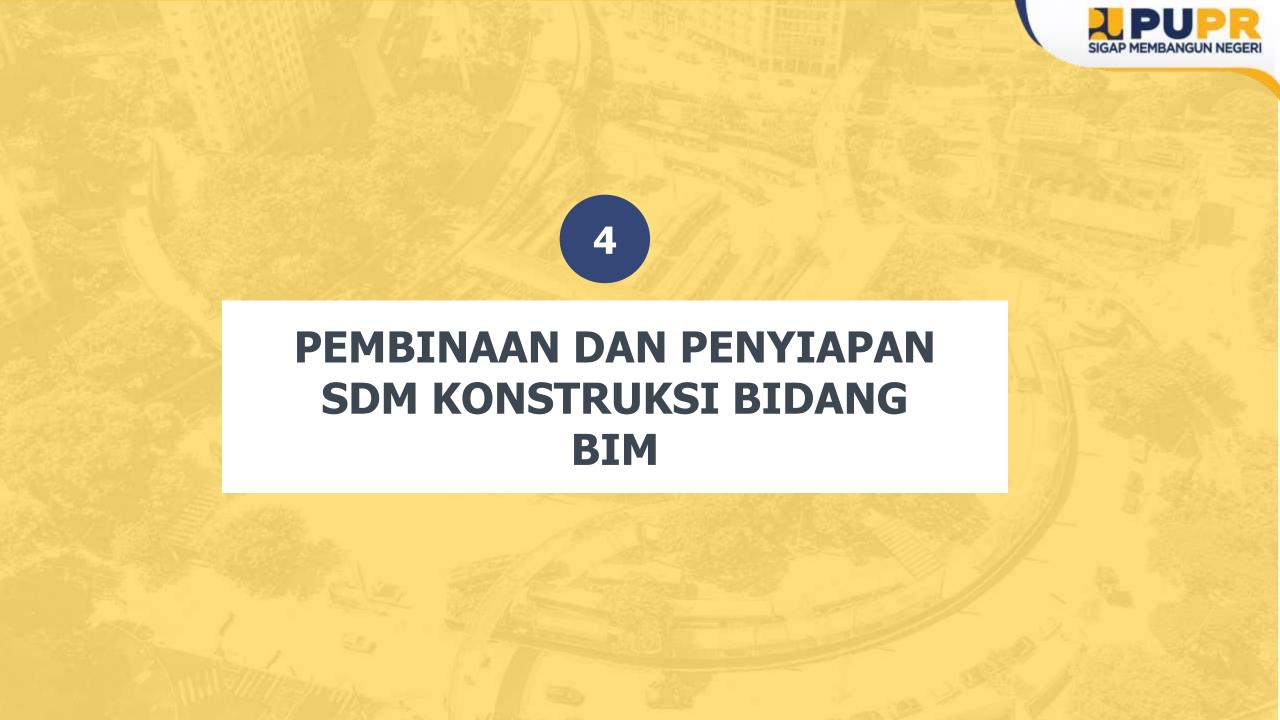
## **IMPLEMENTASI BIM DI PROYEK**

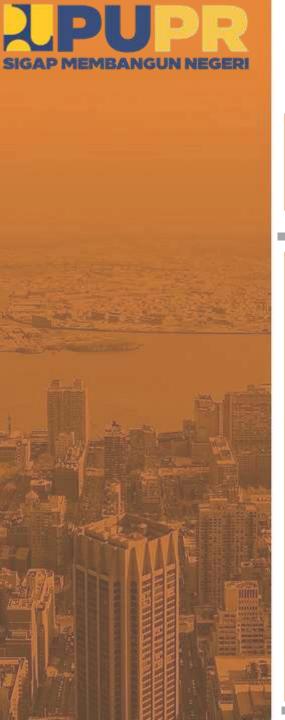




Proyek Bendungan PIDEKSO merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang terletak di provinsi Jawa Tengah, di Kabupaten Wonogiri tepatnya di desa Pidekso. Proyek ini dibawahi oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo.







## **UPAYA AKSELERASI IMPLEMENTASI BIM**

Penyusunan Regulasi dan Kebijakan Bidang BIM Peningkatan Kompetensi SDM Konstruksi

- Penyusunan standar protokol dan pedoman penerapan BIM
- □ Pemetaan penerapanBIM
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan BIM
- Penyiapan Infrastruktur teknologi BIM dan integrasi system di Pusdatin PUPR



- Penyusunan standar kompetensi bagi tenaga kerja konstruksi
- Penetapan jabatan kerja pada bidang BIM
- Menjalin Kerjasama dengan stakeholder
- Pelaksanaan pelatihan bagi tenaga kerja konstruksi dan calon tenaga kerja konstruksi

## **SKKNI BIDANG BIM**







#### MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

#### KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN; ANALISIS DAN UJI TEKNIS BIDANG BUILDING INFORMATION MODELLING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun
2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas
Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok
Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji
Teknis Bidang Building Information Modelling.

b. bahwa Rancangan Standar Kompetersi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Bulding Information Modelling telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 20 Oktober 2022 di Jakarta; KETIGA

Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEEMPAT

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Jenuari 2023

MENTERI KETENAGAKERJAAN BEPUBLIKANDONESIA,

IDA FAUZIYAH

ממ

## **DAFTAR UNIT KOMPETENSI BIDANG BIM**





TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menerapkan Building Information Modelling (BIM) pada penyelenggaraan proyek jasa	tuilding organisasi penerapan BIM organisasi  fodelling (BIM) ada enyelenggaraan royek jasa		Menentukan Information Requirements (IR) Building Information Modelling (BIM) organisasi
konstruksi sepanjang siklus bangunan berlangsung yang memenuhi syarat, standar, integrasi, dan interoperabilitas			Merumuskan kebijakan penerapan Building Information Modelling (BIM) organisasi
interoperatinas		10	Menyusun petunjuk pelaksanaan Building Information Modelling (BIM) organisasi
		Mengendalikan penerapan BIM organisasi	Melaksanakan manajemen risiko penerapan Building Information Modelling (BIM) organisasi
			Melaksanakan penjaminan mutu penerapan Building Information Modelling (BIM) organisasi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
	Mengelola BIM proyek	Merencanakan penerapan BIM proyek	Mengkaji Information Requirements (IR) proyek dari pihak penunjuk
			Menentukan tujuan penggunaan Building Information Modelling (BIM uses) proyek
			Menyusun rencana task team untuk penerapan Bulding Information Modelling (BIM) dalam Proyek
			Menganalisis risiko penerapan Bulding Information Modelling (BIM) dalam proyek
			Menyusun tanggapan dokumen tender terkait penerapan Building Information Modelling (BIM)
			Menyusun dokumen paska penunjukan terkait penerapan Building Information Modelling (BIM)

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
, UTAW			Merencanakan produksi data model Building Information Modelling (BIM)
		penerapan BIM proyek	Menerapkan penjaminan mutu informasi dalam data model Building Information Modelling (BIM)
	6	5	Membuat dokumentasi tim kerja Building Information Modelling (BIM)
	Melaksanakan BIM proyek	Mengatur aspek teknis lingkungan kerja BIM proyek	Melakukan sinkronisasi alur koordinasi kerja dengan partisipan Building Information Modelling (BIM)
			Menyiapkan perangkat kerja pembuatan data model Building Information Modelling (BIM)
			Menyusun cetak kerja dasar Building Information Modelling (BIM)
			Melakukan pengaturan lingkungan kerja Building Information Modelling (BIM)

## **DAFTAR UNIT KOMPETENSI BIDANG BIM**





TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan penjadwalan kerja tim sesuai dengan jadwal proyek
			Memeriksa kesesuaian data dengan dokumentasi
			Melakukan perubahan Building Information Modelling (BIM)Execution Plan (BEP)
			Melakukan penggabungan data partial model menjadi federated model
		Mengelola data model BIM lintas dimensi	Menguraikan data model berdasarkan kuantitas
			Melakukan simulasi penjadwalan dengan data model Building Information Modelling (BIM)
		Menyelesaikan masalah permodelan	Mengembang- kan solusi berbasis rujukan tepat guna
			Menyesuaikan data model Building Information Modelling (BIM) dengan data engineering

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan evaluasi luaran data model
		Memproduksi data model	Menyediakan data dalam Common Data Environment (CDE)
			Melakukan proses produksi data model Building Information Modelling (BIM)
			Mendokumen- tasikan lembar gambar dari data model Building Information Modelling (BIM)

## **DAFTAR UNIT KOMPETENSI BIDANG BIM**



#### B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI			
1	2	3			
1.	M.71BIM02.001.01	Menentukan Information Requirements (IR Building Information Modelling (BIM Organisasi			
2.	M.71BIM02.002.01	Merumuskan Kebijakan Penerapar Building Information Modelling (BIM Organisasi			
3.	M.71BIM02.003.01	Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Building Information Modelling (BIM) Organisasi			
4.	M.71BIM02.004.01	Melaksanakan Manajemen Risiko Penerapan Building Information Modelling (BIM) Organisasi			
5.	M.71BIM02.005.01	Melaksanakan Penjaminan Mutt Penerapan Building Information Modelling (BIM) Organisasi			
6.	M.71BIM02.006.01	Mengkaji Information Requirements (IR Proyek dari Pihak Penunjuk			
7.	M.71BIM02.007.01	Menentukan Tujuan Penggunaan Building Information Modelling (BIM Uses) Proyek			
8.	M.71BIM02.008.01	Menyusun Rencana Task Team untul Penerapan Building Information Modellin (BIM) dalam Proyek			
9.	M.71BIM02.009.01	Menganalisis Risiko Penerapan Building Information Modelling (BIM) dalam Proyek			
10.	M.71BIM02.010.01	Menyusun Tanggapan Dokumen Tende Terkait Penerapan Building Information Modelling (BIM)			
11.	M.71BIM02.011.01	Menyusun Dokumen Paska Penunjukat Terkait Penerapan Building Information Modelling (BIM)			
12.	M.71BIM02.012.01	Merencanakan Produksi Data Mode Building Information Modelling (BIM)			
13.	M.71BIM02.013.01	Menerapkan Penjaminan Mutu Informas dalam Data Model Building Information Modelling (BIM)			
14.	M.71BIM02.014.01	Membuat Dokumentasi Tim Kerja Buildin Information Modelling (BIM)			
15.	M.71BIM02.015.01	Melakukan Sinkronisasi Alur Koordinas Kerja dengan Partisipan Buildin Information Modelling (BIM)			

NO.	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
1	2	3
16.	M.71BIM02.016.01	Menyiapkan Perangkat Kerja Pembuatan Data Model Building Information Modelling (BIM)
17.	M.71BIM02.017.01	Menyusun Cetak Kerja Dasar Building Information Modelling (BIM)
18.	M.71BIM02.018.01	Melakukan Pengaturan Lingkungan Kerja Building Information Modelling (BIM)
19.	M.71BIM02.019.01	Melakukan Penjadwalan Kerja Tim Sesuai dengan Jadwal Proyek
20.	M.71BIM02.020.01	Memeriksa Kesesuaian Data dengan Dokumentasi
21.	M.71BIM02.021.01	Melakukan Perubahan Building Information Modelling (BIM) Execution Plan (BEP)
22.	M.71BIM02.022.01	Melakukan Penggabungan Data Partia Model Menjadi Federated Model
23.	M.71BIM02.023.01	Menguraikan Data Model Berdasarkan Kuantitas
24.	M.71BIM02.024.01	Melakukan Simulasi Penjadwalan dengan Data Model Building Information Modelling (BIM)
25.	M.71BIM02.025.01	Mengembangkan Solusi Berbasis Rujukan Tepat Guna
26.	M.71BIM02.026.01	Menyesuaikan Data Model Building Information Modelling (BIM) dengan Data Engineering
27.	M.71BIM02.027.01	Melakukan Evaluasi Luaran Data Model
28.	M.71BIM02.028.01	Menyediakan Data dalam Common Data Environment (CDE)
29.	M.71BIM02.029.01	Melakukan Proses Produksi Data Mode Building Information Modelling (BIM)
30.	M.71BIM02.030.01	Mendokumentasikan Lembar Gambar dar Data Model Building Information Modelling (BIM)



## KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI



Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 33/KPTS/Dk/2023

**Tentang** 

Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi



#### KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

"Il Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telapon (021) 7398116 Fakamili (021) 7221782

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

NOMOR 33/KPTS/Dk/2023

TENTANG

PENETAPAN JABATAN KERJA DAN KONVERSI JABATAN KERJA EKSISTING SERTA JENJANG KUALIPIKASI BIDANG JASA KONSTRUKSI

#### DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI.

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Ranska Mendukuns Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi dan terkait dengan penyetaraan atau konversi klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi pada jabatan kerja bidang jasa konstruksi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

4-

KESEPULUH : Dalam hal Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) belum terdapat pemaketan kompetensi, maka pemaketan kompetensi di setiap jabatan kerja yang belum diberikan rekomendasi

KESEBELAS : Jabatan kerja di sektor konstruksi dapat dievaluasi paling singkat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau

sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Terhadap skema sertifikasi yang terdampak akibat berlakunya Keputusan ini, maka Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) diberikan waktu paling lambat 3 (tiga) bulan untuk melakukan penyesuaian sejak Keputusan ini ditetapkan dan selama kurun waktu tersebut LSP masih dapat menggunakan skema sertifikasi eksisting.

lisensi akan ditetapkan lebih lanjut oleh LPJK.

KETIGABELAS : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor

12.1/KPTS/Dk/2022 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi, dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPATBELAS : Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi ini

mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

#### Tembusan:

KEDUABELAS

- 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
- 2. Pejabat Tinggi Madya di Kementerian PUPR;
- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 5. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
- 6. Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- Kepala Dinas PUPR/Organisasi Perangkat Daerah Bidang PUPR Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota;
- Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
- 9. Ketua Asosiasi Profesi di Bidang Jasa Konstruksi;
- Ketua Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja Teregistrasi Bidang Jasa Konstruksi;
- 11. Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi di Bidang Jasa Konstruksi.

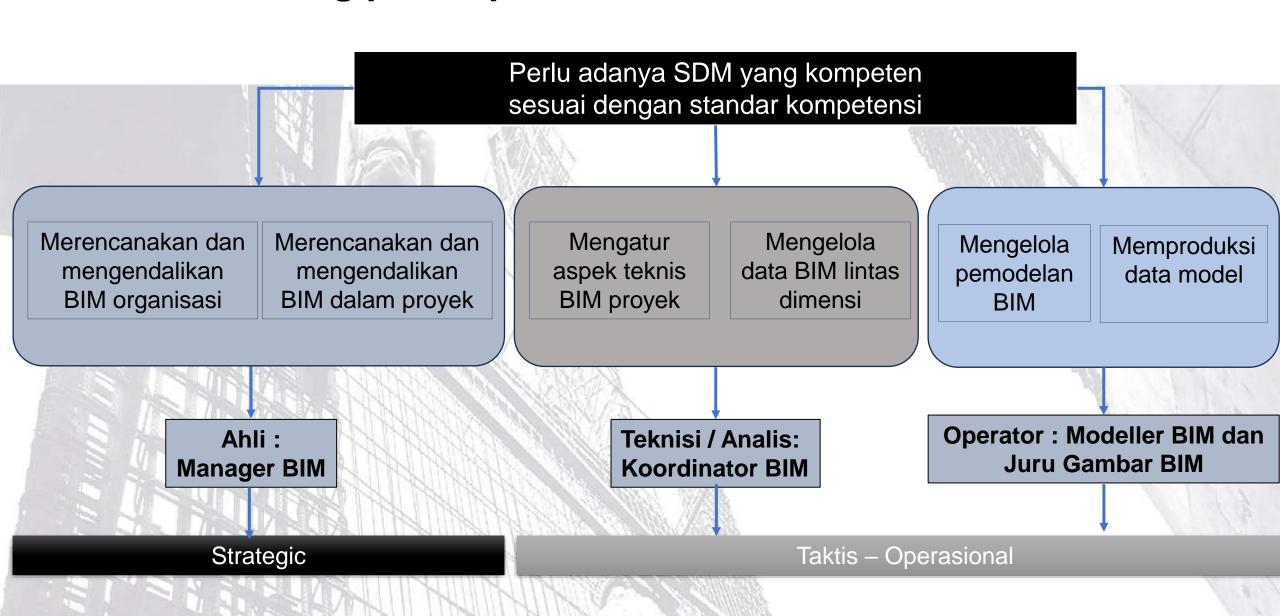
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mareta 223 DIREKTUR JEWALERAL BINA BONSTRUKSI

Dr. Ir. YUDHA MEDIAWAN, M. Dev. Pig.



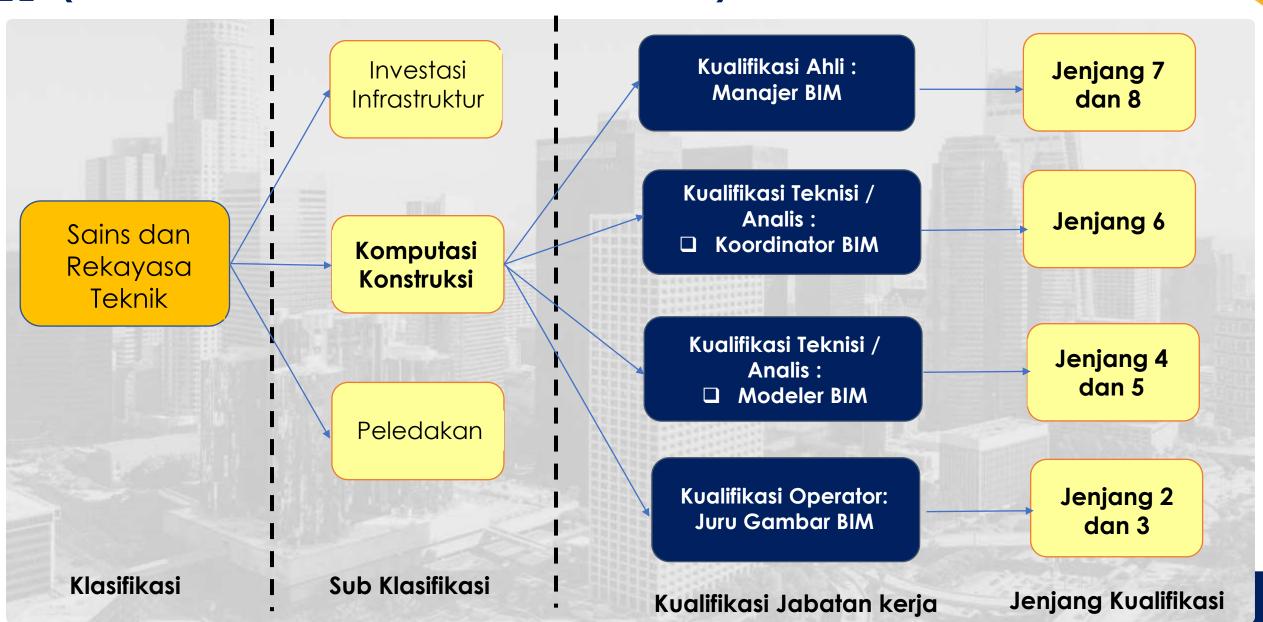
# Tingkatan Kompetensi Berdasarkan SKKNI dalam mendorong penerapan BIM





## JABATAN KERJA KLASIFIKASI SAINS DAN REKAYASA TEKNIK (BERDASARKAN PP NOMOR 14 TAHUN 2021)





## KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI



Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 33/KPTS/Dk/2023

Tentang

Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi

	JABATAN KERJA BARU KUALIFIKASI AHLI PERSYARATAN PE			KETENTUAN				
NO	SUBKLASIFIKASI	UBKLASIFIKASI JABATAN KERJA BARU		KERJA BARU JENJANG ACUAN		PERSYARATAN PENDIDIKAN/ PROGRAM STUDI/ PERSYARATAN TAMBAHAN LAINNYA (**)	PERSYARATAN SKK ASESOR KOMPETENSI Reknik "J	
VIII.	SAINS DAN REBAYABA	TEKNIK						
3	Komputasi Konstruksi	Manager BIN	f Muda	7	SKKNI 3 - 2023	Seluruh Jurusan/ Program	Seluruh SKK Konstruksi pada subklasifikasi Komputasi Konstruksi, Arsitektural, Gedung, atau	
		Manager BIN	f Madya	8		Studi Bidang Konstruksi <sup>17</sup>	Manajemen Konstruksi/Manajemen Proyek (Jenjang 8, 9)	
mi.	KLASIFIKASI SAINS D	AN REKAYASA TE	IKNIS					
1		Teknisi/Analis	Koordinator BIM	6	SKKNI 3 - 2023 Seluruh Jurusan/ Progr Studi Bidang Konstruks		Seluruh SKK Konstruksi pada subklasifikasi Komputasi Konstruksi, Arsitektural, Gedung, atau Manajemen Konstruksi/Manajemen Proyek (Jenjang 6-9)	
		Teknisi/Analis	Modeler BIM Madya	5		Seluruh Jurusan/ Program Studi Bidang Konstruksi(*).	Seluruh SKK Konstruksi pada subklasifikasi	
2	Komputasi Konstruksi	Teknisi/Analis	Modeler BIM Muda	4	SKKNI 3 - 2023		Komputasi Konstruksi, Arsitektural, Gedung, atau Manajemen Konstruksi/Manajemen Proyek (Jenjang 6-9)	
		Operator	Juru Gambar BIM	3			Seluruh SKK Konstruksi pada subklasifikasi	
3		Operator	Juru Gambar BIM Level 2	2	SKKNI 3 - 2023	*	Komputasi Konstruksi, Arsitektural, Gedung, atau Manajemen Konstruksi/Manajemen Proyek (Jenjang 3-9)	

#### Keterangan:

- Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi meliputi:
  - a. Diploma III, Diploma IV, dan Sarjana Teknik (Teknik Sipil, Teknik Geologi, Teknik Pertambangan, Teknik Kelautan, Teknik Pengairan, Arsitektur/Teknik Arsitektur, Desain Interior, Desain Produk, Arsitek Lanskap, Perencanaan Wilayah dan Kota, Planologi, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Fisika, Teknik Lingkungan, Teknik Penyehatan, Teknik Kimia, Teknik Industri, Teknik Geodesi, Teknik Geologi, Teknik Geomatika, Teknik Metalurgi, Teknik Metalurgi Dan Material), Komputasi Konstruksi, Manajemen Konstruksi.
  - b. Sarjana Pendidikan Teknik (Teknik Sipil/Bangunan, Teknik Mesin, Pendidikan Arsitektur/Teknik Arsitektur & Teknik Elektro) untuk Jenjang 6 (enam) dan jenjang 7 (tujuh).



## Building Information Modelling (BIM)



			Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi						
	Kode Unit		Ahli		Te	Teknisi Analis			rator
No.	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi	Manajer BIM Madya	Manajer BIM Muda	Koordinator BIM	Modeller BIM Madya	Modeller BIM Muda	Juru Gambar BIM	Juru Gambar BIM
			8	7	6	5	4	3	2
1	M.71BIM02.001.01	Menentukan Information Requirements (IR) Building Information Modelling (BIM) Organisasi	1		-	1.72	.7.	7.	
2	M.71BIM02.002.01	Merumuskan Kebijakan Penerapan Building Information Modelling (BIM) Organisasi	1	-	-	.=	-	7.	-
3	M.71BIM02.003.01	Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Building Information Modelling (BIM) Organisasi	1	-	-		-	#	-
4	M.71BIM02.004.01	Melaksanakan Manajemen Risiko Penerapan Building Information Modelling (BIM) Organisasi	1	-	-		-	*	-
5	M.71BIM02.005.01	Melaksanakan Penjaminan Mutu Penerapan Building Information Modelling (BIM) Organisasi	1	+	i	-	-	=	-
6	M.71BIM02.006.01	Mengkaji Information Requirements (IR) Proyek dari Pihak Penunjuk	4	٧		-	-	¥.	-
7	M.71BIM02.007.01	Menentukan Tujuan Penggunaan Building Information Modelling (BIM Uses) Proyek	1	<b>V</b>		047	2	2	-
8	M.71BIM02.008.01	Menyusun Rencana Task Team untuk Penerapan Building Information Modelling (BIM) dalam Proyek	4	<b>V</b>	•	(#)	-	ě	-
9	M.71BIM02.009.01	Menganalisis Risiko Penerapan Building Information Modelling (BIM) dalam Proyek	1	1	(#X	1.72	17.	-	-
10	M.71BIM02.010.01	Menyusun Tanggapan Dokumen Tender Terkait Penerapan Building Information Modelling (BIM)	1	√		(*)	0.70	Ħ	-

## Building Information Modelling (BIM)



					Jabatan Kerja	dan Jenjang	Kualifikasi		
	2000 ON 2000 DAY		А	hli	Te	Teknisi Analis			rator
No.	No. Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi		Manajer BIM Muda	Koordinator BIM	Modeller BIM Madya	Modeller BIM Muda	Juru Gambar BIM	Juru Gambar BIM
			8	7	6	5	4	3	2
11	M.71BIM02.011.01	Menyusun Dokumen Paska Penunjukan Terkait Penerapan Building Information Modelling (BIM)	4	√	~	-	-	7-	-
12	M.71BIM02.012.01	Merencanakan Produksi Data Model Building Information Modelling (BIM)	7	√	<b>V</b>	-	-	(-)	
13	M.71BIM02.013.01	Menerapkan Penjaminan Mutu Informasi Dalam Data Model Building Information Modelling (BIM)	√	√	√		( <del>-</del> )	1	1777
14	M.71BIM02.014.01	Membuat Dokumentasi Tim Kerja Building Information Modelling (BIM)	4	√	<b>√</b>		:=:	17.	=
15	M.71BIM02.015.01	Melakukan Sinkronisasi Alur Koordinasi Kerja dengan Partisipan Building Information Modelling (BIM)		-	<b>√</b>	-	: <del>*</del> :	: -:	
16	M.71BIM02.016.01	Menyiapkan Perangkat Kerja Pembuatan Data Model Building Information Modelling (BIM)	-	-	<b>√</b>	-	-	-	-
17	M.71BIM02.017.01	Menyusun Cetak Kerja Dasar Building Information Modelling (BIM)	-	-	<b>√</b>	-	: <del>-</del> :	1+1	:#C
18	M.71BIM02.018.01	Melakukan Pengaturan Lingkungan Kerja Building Information Modelling (BIM)		2	√	141	141	:4:	120
19	M.71BIM02.019.01	Melakukan Penjadwalan Kerja Tim sesuai dengan Jadwal Proyek	-	-	<b>√</b>	-	-	72	-
20	M.71BIM02.020.01	Memeriksa Kesesuaian Data dengan Dokumentasi	(=	-	٧	√	•	(-	
21	M.71BIM02.021.01	Melakukan Perubahan BIM Execution Plan (BEP)	4	√	<b>√</b>	-	-	1.7	/
22	M.71BIM02.022.01	Melakukan Penggabungan Data Partial Model Menjadi Federated Model	<b>V</b>	√	√	7	√	√	
23	M.71BIM02.023.01	Menguraikan Data Model Berdasarkan Kuantitas	-	-	-	√	√	√	
24	M.71BIM02.024.01	Melakukan Simulasi Penjadwalan dengan Data Model Building Information Modelling (BIM)	1	√	√	√	√	-	-
25	M.71BIM02.025.01	Mengembangkan Solusi Berbasis Rujukan Tepat Guna	4	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	1+1	(#C)

## Building Information Modelling (BIM)



			Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi							
	0.0000000000000000000000000000000000000		Ahii		Te	knisi Analis		Operator		
No.	No. Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi	BIM BIM	Manajer BIM Muda	Koordinator BIM	Modeller BIM Madya	Modeller BIM Muda 4	Juru Gambar BIM	Juru Gambar BIM	
			8	7	6	5		3	2	
26	M.71BIM02.026.01	Menyesuaikan Data Model Building Information Modelling (BIM) dengan Data Engineering	*		٧	4	٧	4	٧	
27	M.71BIM02.027.01	Melakukan Evaluasi Luaran Data Model	7:	-	4	4	2,54		3.5	
28	M.71BIM02.028.01	Menyediakan Data dalam Common Data Environment (CDE)	7.	51	4	4	٧	4	٧	
29	M.71BIM02.029.01	Melakukan Proses Produksi Data Model Building Information Modelling (BIM)	7:	71		4	4	4	4	
30	M.71BIM02.030.01	Mendokumentasikan Lembar Gambar dari Data Model Bullding Information Modelling (BIM)	**	71			2,50	4	V	
-	Jumlah Unit	Kompetensi tiap Jabatan Kerja dan Jenjang	18	13	16	9	7	6	4	

### KERJASAMA ANTARA DJBK DENGAN TRIMBLE SOLUTION





#### MEMORANDUM OF UNDERSTANDING KEBEPAKATAN BERSAMA



DETWEEN

THE DIRECTORATE GENERAL OF CONSTRUCTION DEVELOPMENT OF THE MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND HOUSING

TRIMBLE SOLUTIONS (SEA) PTE. LTD.

CHRENTORIAT JENCERAL BINA KONSTRUKBI KEMENTERIAN PEKERLIKAN UWUM DIAN PERUMAHAN RAKTAT.

TRIMBLE SOLUTIONS (SEALWIS LTD.

ON

THE IMPLEMENTATION OF BUILDING INFORMATION MCDCLLING (SIM) TRAINING USING TEXTLE STRUCTURES AND TRINBLE CONNECT

#### TENDANG

PELATSANAAN PELATRIAN

IMPLEMENTASI BURLONG INFORMATION BODELANG RIBIN DENGCAN MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK
TEKA A STRUCTURER DAN TRIMBLE COMMECT

On this day, Setunday, August 21, 3822 in Penajan Paser Utana, we the undersigned

- In Yudha Mediawan M.Dev Pig. As the General Director of Dras Novathan in this case acting the end to passed of the Directorate General of Construction Development. The Membry of Publish Works and Felianding whose apparent the Presidential of Republic Indonesia. Discover Republic 107(1779). Register of Publisher Indonesia. Discover Republisher Indonesia. Discover Republisher Indonesia. The Apparent Publisher in Mediatry of Publisher High Lauder Peelikon in Mediatry of Publisher Valley. New York Novator Conference of the Publisher Indonesia. Indonesia of Juliana Pattern yan New 20 Novatoriana Baser. Juliana Selatan, Internation teleproci.
- 2. Thomas Phang, Ph. D. As the Area Director of Trincis Solutions (SSA) Part List, and Mounteel 1, 2010-with the Employee ID 19794 having the address of 3 Harbandroot Floor. #13-02. Helebushton? Tower Two, Singapore 000254, eth? the Representative ordice in blookes at South Charlest. Tower A, 11th Fl., Uet G. A. SA, Karth Kelv. 6, Climitati. Repair Agination 13-on the "SECOND PARTY."

The FIRST PARTY and the SECOND PARTY Invention returned to as "THE PARTIES" and individually as a "PARTY". FIRST PARTY, and SECOND PARTY, shall first explain the following matters:

- The PIRST PARTY is a Work Unit at the Meeting of Public Works and Housing which has the lask of formulating and implementing policy in constitution service development in accordance with applicable lase.
- b That the SECOND PARTY are size of the fashness another in Software for Innovation and Construction Technology sector
- THE PARTIES error and congenition agreement based on laws and regulations related to construction services, anti-monopoly, and business competition.

Pede hari er Sabtu tenggel Dua Pulah Tujuh bulan Aguetus Tahun Dua Ribu Dua Pulah Dua bertengger is Penajaen Paser Utara, karai yang bertendatengan di beseh ini 1. Dr. W. Yudha Mediawan M.Dev Pig.: Setatu Direktur

- Jendond Brus Korstrukui, dalan hal eri berlichlik Unlük.
  Olin istas varan Cirothood Jendond Brus Korstruki.
  Kamenderian Prüseppan Chram des Fernandern Rüssel,
  kamenderian Prüseppan Chram des Fernandern Rüssel,
  kamenderian Prüseppan 10/17FA Tehan 2001 tertakap
  Brustik Nützleriseli Normal 10/17FA Tehan 2001 tertakap
  Brustikeriseli Normal 10/17FA Tehan 2001 tertakap
  Brustikeriseli Artikologia Müdya Di Lingkongae
  Korstandorian Velenigians Limum dan Feoreration Rashyst.
  Brustikerisel State Prüserises Stat. 20. Kologoria Baru,
  Jakarta Selatan, yang zelanjutnya diselad. "PRAK
  KERATI"
- 2. Thomas Phang, Ph. D. Solain, Direktur Awa Tembol Solations (SEA) Phe. Ltd., per langgat 1 November 2010 denger. Novem Pegasat 19794, Sentamot di 3 Harbourtout Place. 813-02 Harbourtout Tower Nov. Sengapore 060054. Dengen Kontra principilari di Indonessa yang Sentamot di South Quarter, Tower A. J. 15 Use G. J. R. K. Krist Key. C. Golandos Barta (SEA) 12430. Indonessa, yang sellanjutnya disebut "PRIAX KRIDAN".

PHAK KISATU dan PHAK KEDUA selanjanya sedara benama sama disebat PARA PHAK' dan mening-making disebat juga PHAK', PHAK KEDATU dan PHAK KEDUA terladi danuk menenggian nahal sebagai beladi.

- Bishwa PRAK KESATU merupakan Unit Keja di Komerbolan Pelanjaan Unian dan Perurahan Rahyal yang merupak lapas menyekenggaman perumaan dan pelateanaan kebijakan di bidang pendenaan bidang jima konshikali sesaal dengan ketentuan perubang perubagi perubagan perubagi pendangan
- fishes PPHAK HEDUA merupakan salah sala badan usaha di Bidang Perangkai Lunak untuk triovesi dan Teknolog Konstuksi.
- flutwo PARA PHAX sepakal retributan perjenjan kegasaha berdasarkan pereturan peruntang-undangan terkat jasa keratruhai, anti menopok dan persangan —

a.

#### Trimble

#### MEMORANDUM OF AGREEMENT PERJANJAN KERJA SAMA

RETWEEN

THE DIRECTORATE OF CONSTRUCTION COMPETENCY AND PRODUCTIVITY DIRECTORATE GENERAL OF CONSTRUCTION DEVELOPMENT THE MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND HOUSING

TRIMBLE SOLUTIONS (SEA) PTE, LTD

SMEKTCHAT KOMPETENSI DAN PRODUKTNITAS KOWETRUHSI DHEKTCHAT JENDERAL BINA KONETRUHSI REMENTENSI PENERJAJAN LIMIN DAN PERUMAHAN RAKYAT DENIMAN

NUMBER SOCUTIONS (MEA) FTE. LTD.

THE IMPLEMENTATION OF BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM) TRAINING USING TEXAS STRUCTURES AND TRIMBLE CONNECT

TENTANG

PELAKBARAAN PELATRAN MPLEMENTAN BULLDING RECORDATION MCCRELLING (BINI) DENGAM MERGIJUWAKAN PERANDIKAT LURAR TEKLA STRU ACTURES DAN TRIMBLE CORRECT

NOMOR SZPRSKT0922

On this day, Monday, September 1, 2022 (2022-09-5) in Johanna, on the protocopyrical

- 1. Dr. Deuty National Profession Nazamonetricis E. M. E. Andrew Hancon et al. Internationals Computernity and Productively in the cases sorting for and an inetial of the Directorate of Computernities in Computernities and Productively, Mariney of France Andrews and Headers, Marines 1700 (SPTTS) 100 (2004) Cases Charles and Professional Director International Computernities in Computernities and American Professional Computernities in Computernities and American Professional Computernities in Computernities and American Computerni
- Parmettenji, M.E.A. An Em Clustly Managini of Indonesia Platinisetilativo Office of Trivilla Statisture (1844). Plan Ltd., and of August 7. 2014, volt the Engistynes (3) 1978; Traving the address of South Chursty, Traver A., 117-71. Unit G. A., TAR. Karley Nat. B. Outside States (Sept.). Indonesia. Assentially: Informal to see the "SECOND PARTY."

The PRIST PARTY and the SECOND PARTY Investigate ordinal to the PARTY and individually as a PARTY. PRIST PARTY, and SECOND PARTY, shall first explain the following coulton:

- a. The FIRST PARTY is a Work Use at the Swelchester General of Contricctors Development at the Ministry of Public Works and Howard Adult has the face of Explaineding prints (Involvedon, property regulation formation, requirements) patience and augmentate in the field of competitions and productively of constitutions in the field of competitions and productively of constitutions.
  8. That the SECONG PARTY are used the Suprises entities.
- at Software for immovation and Communition Technology Senter
- THE PARTIES and the constitution agreements based on laws and regulatory regard to destination services, and recorpsist, and to arrow competition and government alternations.

Parts non in Senin tanggal Lima tulun September Tehun Das Ribe Due Puluk Due tertenpat di Jakarta, kieni yang tertendaknyan di terseh se :

- Dr. Deuty Michigantriala Cashishiyi Mazamandinin S.E. M.Siz Gessel Christian Konnephrania dan Hondalindan Karamanani, disawa hali ni berbindeki untuk dian alam harin Direktorak Kongelerini dan Produkhidan Kimendahai yang diangkol berbindekan Surait Kapujukawa Marinda yang diangkol berbindekan Surait Kapujukawa Marinda Pelabelgah. Liharun dan Presentakan Kilagai Basanar 200. 1972-2 Nr. 2000 Impiguti 21 Desember 2002 bersamp Jakistan Propinser 1-baya Justim dari dibi dibian Jakistan Propinser 1-baya Justim dari dibian Asimirahasan dari Marindahasan Pelaberjain Minari dan Persamahan Marindahasan Pelaberjain Minari dan Rayia, Kontgalas Pul, Padan Jamob Malayarina Lama, Jakatan Selatian, yang bertanpunya dibakan Pelaban.
- Permeldengi, M.B.A. Seidels, Country Manager dan Serber Persestions Treebis Schildren (ISA) Pin. Ltd., and Sangaper 7 Apostos. 2011 deepger Nerber Programs 19792; Seidelmank & Statt Calpine, Toward A, LL11, 2015 G. A. PA, Kartier Nert. G. Clandels State Laudels 12430; Indonesia, yang selenjahnya clantur. PINAL KEDUA.

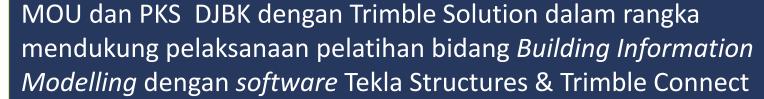
PRIAK KEBATU dan PRIAK KEBUA MINYURNYA SERIFIK Intristrationa disebut PAKK PRIAK dan mising-manog disebut juga "PRIAK" PRIAK KEBATU dan PRIAK KEBUA terhidih dahulu menerangkan tur-hat sebagai berkat

- 8. Outrine PHAIA KEDATU recompanya Unit Kings of Oyenthoral Americal Servi Kivistakai di Assantanzara Polarizoni Universi fian Persentian Religiot yeng recompanya kagai melaksansitan provinsiana kebijakan, pemperanya provinda pengularanjendorisaan pemeranjan can pangularan-di bidang pakakempetanal ian pendudukan kana kerinsiskan. Bidahan PHAIA KEDUA mencakan salah salah terdah.
- useria di bitang perengkal kesak urdak senusi dan sakentagi keramatas E Sefesi PARA PRAK separat melahakan penjanjan kerimatana berdasahan pendasan penjanjan

Ellerine PARA PRAK yeunest mesteuten jemigrepen kertenanne beridaantan perubahan perundanjerdangan terdad pina korstinaks, anti menegak, dan perunangan untuk Staks selaat, dan jemistran terkat pahanganasa perindangan.









### KERJASAMA ANTARA DJBK DENGAN TRIMBLE NAVIGATION





#### REMORANDUM OF UNDERSTANDING



THE DIRECTURATE GENERAL OF CONSTRUCTION DEVELOPMENT OF THE MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND HOUSING

THRREE WAVISATION SINGAPORE FTE LTD

DREKTORAT JENDERAL BRAK KONSTRUKS NUMBER OF THE PERSON AND LINEAR THAT PERSONNERS WAS LATER.

THREE E NAME AND ADDRESS AND A

THE HUMAN RESOURCE COMPETENCE UPSKILL IN THE FIELD OF DECEMPATIAL TO ACRESTE BUILDING IMPORBATION WOODS LING DING OF DIGITAL COMMITMUSTICIN INCHINAL DING INCH FROMER & CONTRACTOR SCIENTIFICAND

PERMITA TEN PERMITETEM SEMINENT SEMINEN DE PARA MANUTOR DE RESANS DESIGNAS CHALLING MEDICALINE WITH STATES SEED THAN WASHING AND DESIGNATION MEDICAL THAN DESIGN STATE ACCRECATION OF DESIGNATION OF STATES AND ACCRECATION OF

Dr. His day, Salvetay, August 27, 2022 in Paragain Paras

- 1. Dr. In: Youtha Mindowan M.Dan Phy. An General Director of Equipments of the Commission of Experiments of the Commission o on behalf of the Directorate Garwini of Construction Development of the Minsely of Public Works and Public Housing, who was apported based on the occupt of Presidential Decise of the High-bits of Indonesia Number NATIONAL OF STATE ASSESSMENT PROPERTY AND PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TO PAR From and follow bloads High Lastening Profitors within the Minkey of Public Works and Public Housing, Swing. Norther address of Jahr Fellowure No. 20. Nathanne Stary, South Johans, functivallar soluted to all You FAST
- 2. John Whiteleast As the APINC Senter Streets of Sales S. Coordinates of Economic Navigation Strepayone Phy. L80 who: need since on 1 June 2011, and having the address of 3 forburberi Place, #13-02 Harbourbori Timer Two. frequent 198056, beneather referred to an the

The FIRST PARTY and the SECOND PARTY are immediareflectively referred to an Eur TARTY and each in also referred to as a "PARTY" The PROOF PARTY and the BECCHIE PARTY shall find explain file following matters.

- is. The PIRST PARTY is a Year Cold of the Shrindly of Public White and Public Housing which has the last of carrying. out the formulator and implementation of policies in the fall of construction services in accordance with the conductors, AT Por Inconstance.
- The SECOND PARTY is one of the business proles in the Note of Compated tools, software for Sureny and Crystal reduction Technology -
- That the PARTIES agreed to order into a communities aprented based on the lasts and regulations, related to construction services, and moreover, and order trustment competition, and expensions related to government

1985 that observance of the lasts and regulations as follows Lake of the Empublic of Automora Number 13 of 2001 regarding Worspoors (State Counts of 3017 Number 26. Equipment to the State County of the Regulator of

Indichessa Number 4270c.

Parts had in Salda tempor Das Putoti Trach below Aquature. Tahan Dae Ritte Dae Pulan Dae beterryst it Pengen Paser Uters, hard yang berlantatorgan di basah as. --

- 3. Dr. N. Yorke Medianer Miller/Pig. Sciato Disease Jerobrol Strue Rorietyckol, Oaken hat yet bertindek untuk dan offee marker December 2 Services of Street Name of Sciences and Street Sciences and Sciences and Street Sciences and Sciences Pokelpen Union das Perprohen Relyal, seng dangkal bertsucker Police September Presiden Republik Automore Names 107774, Salvan 2021, Swilling Printerhantias del Pergangkation Del den Daten Jatisten Propriet: Trigg Marke III Lingburger, Kamerlanian Pakerpan Union dan Perunahan Rakyal, beralama di John Patterine No. 20, Katapolet State, Jahorta Sebson. SING HOUSENING WHILE THIS REGISTE!
- John Whitehald, Solding Direktor Service Distribute days Personal wileyah Asia Paulik dasan hai es bantrolat untuk tion also name Tombie Navigation Singapore PTS CTD perg stergist seas 1 Jun 2011 dan bersiene di 3 Refearbook Place, \$15-02 Harbourbook Tomo: Two. Sequery 20024, yell solvania data! "Frakt.

PRINT KERATU DIN PRINT MEDIA MINUSTRA MUNIC betterminated shalled "FARA PRIAS" day, framely-making Storing your "PRAK" PRINT RESERVE OUR PRINT RESIDE terbilit (letter); transcomptan hal hal sebaga backut --

- is flation PROBE RESATU remarked the Nation of Nemembros Paterjasi Uman dat Paterialias Raigal parg. nemperor tiggs nervelenganism promises also pelaksaraan kelojakan di Sillang pembinaan tidang jasa konstrukci sessas dangan katantuan penaluran perundang-
- Times POSSEXCOLA mergatur sold sets belor usulaif Siding penergket knok dan dan dat Sampanial untuk
- Toront PARA PRINT second reconnect program terpeans termester pentrus peroxing-unlerger lettal joid honoroks, and remopol, the perumper-scale finite softed, sign perphylan farkad polymorphism parties ingelsen.

mengemethen proteins percelong-unlarger Selfrage Seriout

Underly Underg Roscottik Habrance Somer 15 Tahun 2023 Serrong Epranagele-pain (Leinbara) Yaqana Yatun 2017 Number 36: Tambahan Leesbarah Negara Republik Indonesia



#### AMAE ALBERT MAILHALES

THE DIRECTORATE OF CONSTRUCTION COMPETENCY AND PRODUCTIVITY DIRECTORATE GENERAL OF CONSTRUCTION DEVELOPMENT THE MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND HOUSING

THIMBLE NAVIGATION SINGAPORE PTE LTD

DIREKTORAT ROMPETENEI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI DIRENTORAT JENESERAL BINA KONSTRUKSI REMENTERIAN PEKERJAAN UMUM SAN PERLINANAN RAKYAT

TRIMBLE HAVIDATION BINDAPORE FTE LTD

THE UTILIZATION OF TRIMBLE GEDERATIAL SOLUTIONS IN BUILDING INFORMATION MODELLING TO SUPPORT THE BIPLEMENTATION OF CONSTRUCTION DIGITALIZATION

PENSAFAATAN TRIBINGE DEDSEATIAL BOLUTTONS PADA PELAKBANAAN PELATRIAN BUILDING INPORTATION MODELLING DALAR RANDKA MENDURUND IMPLEMENTABI ENGITALISABI KOHSTRUKSI

In this day, Thursday, 34th Nov. 2022 in Jakorta, we the

- Dr. Dedy Natrifahrisat Dedicky Nazaroeddin S.E. M.St. As the Director of Cornetschin Competency and Productivity in this case acting for and on battaff of the Westerale of Constructor's Congetenous and Productivity, Ministry of Public Works and Hosping, whose approvided by Mirrorry of Public Structs and Housing Decree Number 1765 / KPTS / M 2525 dated December 21, 2635 regarding the Dismissial and Appointment From and to Proefforn of High Leadership and Administration having the address at John Sopta Tanona Raya, Risbayoran Li Jakarta Selatan, here in after referred to as the TREST
- Darke Tay: As the Asia Residenti Eslaw Managas of Tolera Navapation Singapore Ple 195, as per April 14, 2014 having the address at 5 Harbourford Place, #15-52 Harbourtrant Tower Tyes, Stroppore (200204: huminufer referred to as the "MEDDING PARTY".

he PRST PARTY and the SECOND PARTY humanular red to an THE PARTIES and expendically as a PARTY. RST PARTY, and SECOND PARTY, shall first explain the

- The PRET PARTY is a titue Unit of the Directorate Sprand of Corobation Development of the Mintell of Public Wriste and Housing which has the task of implementing policy formulation, product regulation Retrolation, implementation pullstance and supervision in the field of competence and productivity of composition
- That the SECOND PARTY are are of the business entities is Triesbe Inc. for tensoration and Construction Technology

THE PARTIES were two conpension agreements based. ne laws and regulations revised to construction services, anti-monopoly, and business competition and government

- Dr. Desty Natiffutorizal Desteby Nationalidis S.E., M.Si. Salaku Dirakkur Kompateral olan Produktokan Konatokan dialogo had no bardinologi untuk dian atian nama Climboora Europelansi dan Produktiriba Kombruksi yang diangkal bertimetur Soral Kepulusan Merteri Palonjaa tion Perumahan Rakyat Nomer 1793 / NPTS / M / 2020 terggel 31 Desember 2020 tentung Puntumbertum dan Pengangkalan dari dan dalam Jabatan Pengasan Tinga Protome can Jabatan Administrator ili Remontation Pekerjeen Umum dan Penunahan Rakyat bendamat d Jalen Sapte Tanana Hasa, Komplek PU Passer Junus Foliaycon Lama, Joharla Seletan, yang selepanya STREET, PINAN KESATU
- Karrior Perwakitan Trindle Yangsaton Singapore Ple. Ltd. per tanggal 14 April 2014, frendamat is 5 Nerbountrale Place, #13-52 Harbourhold Tower Two, Strangers
- Daties PRIAK KESATU Herspoken tirel Kielje ill Circulated Ameliand Stree Remember of Kennethelan Pokerban Umon den Perunahan Rakust yang meroponyal fugas melatinanakan penyeusan kelijakan penyusunan produk penpaturan, pendinsan peranapar Out perspenseur of billing kompetered dan produktivber
- Sahus PRIAK KESUA mengulum salah satu balan unate diseast Trindle inc yong temporal in bislang
- Solves PARA PINAK exposed metalsular percentan tests same herdosarken pereturan perundang-undangan buksat

Pada hari tri Kamia tarquel Dua Puluh Empat tutor November Tahum Dua Wits Dua Poluti Dua turtempat it

Trimble

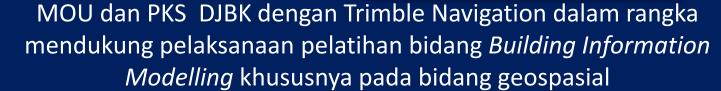
- Dartic Tay, Solabu, Asia Plagranal Salan Managar dan 099054, young semeratrus standar, "PRINAK KEDICA".

PHAK KESATU ON PHAK KEDUA WINGINGS SHOWS between carry duelot "PARS PRISE" day region of diselect page "PINAK". PINAK KESATU dan PINAK KESILA terheleth statusky meanuronghan hat ikat exchange (serikud. -

- reposted unit-A treviale (Set Metodegi konstitubis). --

PENANDATANGAN MOU ANTARA **DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI DENGAN** TRIM E NAV CATION SINGAPORE PTE. LTD







## TARGET PESERTA PELATIHAN BIDANG BIM



## CALON INSTRUKTUR

□ ASN□ Akademisi

### ASN PELAKSANA TEKNIS

- □ PPK
- Kasatker
- Pokja PBJ

### **ASN MANAJERIAL**

- Kepala Balai / Kasubdit
- Eselon II /Direktur /Kepala PusatEselon I

### PENYEDIA JASA DAN VOKASI

- → Penyedia jasa terkontrak
- Lulusan SMK, Politeknik, dan Perguruan Tinggi

Mendorong Jenjang Vokasi (SMK, Politeknik, dan Perguruan Tinggi) untuk dapat terlibat dalam pelatihan Building Information Modelling, sehingga memiliki kemampuan terkait implementasi BIM pada proyek konstruksi





## Implementasi BIM sesuai Instruksi Menteri



#### MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 4 /IN/M/2022 TENTANG

STRATEGI PENCEGAHAN RISIKO PENYIMPANGAN DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2022-2024

#### MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

#### Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, akuntabel, dan kapabel sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu menyusun strategi pencegahan risiko penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2022 - 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Strategi Pencegahan Risiko Penyimpangan dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022 -2024;

#### Mengingat

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84):
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120);

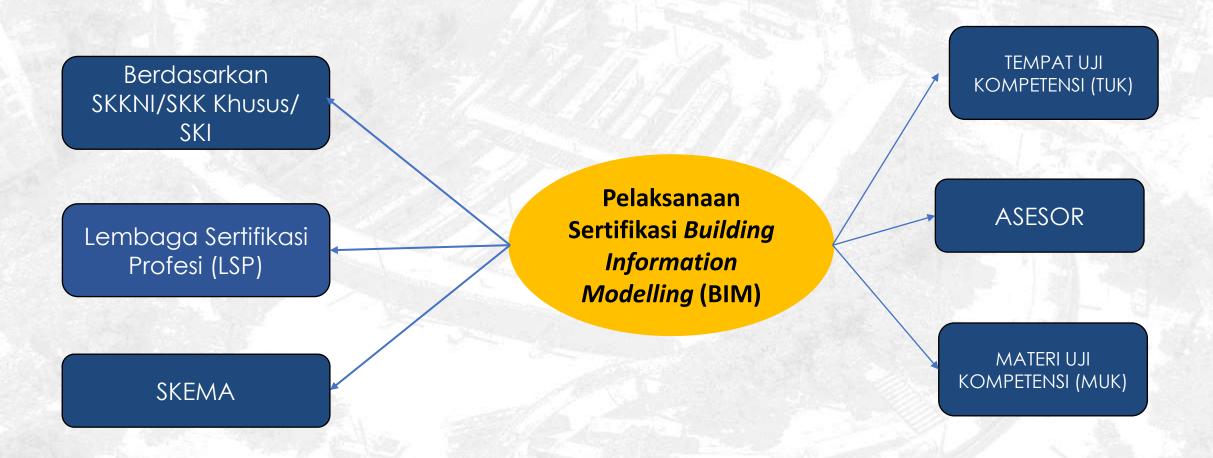
# INSTRUKSI MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 4 /IN/M/2022 TENTANG STRATEGI PENCEGAHAN RISIKO PENYIMPANGAN DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2022-2024

- Mendorong Implementasi BIM pada Peningkatan Tata Kelola Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pada Proyek Strategis Nasional sejak tahap perencanaan sampai tahap operasi dan pemeliharaan.
- Mendorong pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi penggunaan teknologi BIM

Mendorong penetapan R-SKKNI Bidang BIM menjadi SKKNI ke Kementerian Ketenagakerjaan



## Kesiapan Pelaksanaan Sertifikasi



## Kesiapan Pelaksanaan Sertifikasi

### SE LPJK Nomor 3 Tahun 2023

### Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 33/KPTS/Dk/2023

**Tentang** 

Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi



#### KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

NOMOR 33/KPTS/Dk/2023

TENTANG

PENETAPAN JABATAN KERJA DAN KONVERSI JABATAN KERJA EKSISTING SERTA JENJANG KUALIPIKASI BIDANG JASA KONSTRUKSI

#### DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI.

Menimban

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pacal 22 ayat (6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakvat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Ranska Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Basi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi dan terkait dengan penyetaraan atau konversi klasifikasi. subklasifikasi, dan kualifikasi pada jabatan kerja bidang jasa konstruksi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaktanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaktanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organizaci dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri



Dalam hal Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) belum terdapat pemaketan kompetensi, maka pemaketan kompetensi di setiap jabatan kerja yang belum diberikan rekomendasi lisensi akan ditetapkan lebih lanjut oleh LPJK.



#### KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI J. Willywal No 68 RT 09/ RW 05. Petopogan, Kebayoran Ban, Jakarta Selatan, Jakarta 12/70 Tela. (02/1 72789126

Kepada Yth

Tim Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP, dan Pencatatan LSP Terlisensi, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

#### SURAT EDARAN

NOMOR: 03 /SE/LPJK/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NOMOR 02/SE/LPJK/2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP), PENCATATAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) TERLISENSI, SERTA DAFTAR PENYESUAIAN STANDAR KOMPETENSI KERJA DAN JABATAN KERJA KONSTRUKSI

#### A. UMUM

Schubungan dengan adanya kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait Jabatan Kerja Baru Sektor Konstruksi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 33/KPTS/Dk/2023, maka Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi memandang perlu menetapkan Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02/SE/LPJK/2023 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Jabatan Kerja Konstruksi.

B. DASAR PEMBENTUKAN

Dan seterusnya.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Dan seterusnya.

D. RUANG LINGKUP

Dan seterusnya.

E. KRITERIA PEMOHON REKOMENDASI LISENSI LSP

Dan seterusnya

F. PERSYARATAN PERMOHONAN REKOMENDASI LISENSI LSP Dan seterusnya.

Pedoman pemberian lisensi bagi LSP dalam rangka pelayanan Sertifikasi Kompetensi Kerja



## Kesiapan Pelaksanaan Sertifikasi



#### KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Wijaya I No 68 RT 09/ RW 05. Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta 12170 Telp. (02/) 72789126

Kepada Yth.:

Tim Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP, dan Pencatatan LSP Terlisensi, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

#### SURAT EDARAN

NOMOR: 03 /SE/LPJK/2023

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NOMOR 02/SE/LPJK/2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP), PENCATATAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) TERLISENSI, SERTA DAFTAR PENYESUAIAN STANDAR KOMPETENSI KERJA DAN JABATAN KERJA KONSTRUKSI

#### A. UMUM

Sehubungan dengan adanya kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait Jabatan Kerja Baru Sektor Konstruksi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 33/KPTS/Dk/2023, maka Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi memandang perlu menetapkan Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02/SE/LPJK/2023 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Jabatan Kerja Konstruksi.

#### B. DASAR PEMBENTUKAN

Dan seterusnya.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Dan seterusnya.

D. RUANG LINGKUP

Dan seterusnya.

E. KRITERIA PEMOHON REKOMENDASI LISENSI LSP

Dan seterusnya.

F. PERSYARATAN PERMOHONAN REKOMENDASI LISENSI LSP

Dan seterusnya.

SADIS DAN REKATASA TEXNIK	Investaci Infractruistur	Ahli	Ahli Madya Perencana Proyek Infrastruktur	8	SKRON 372 - 2013
	STATE OF THE PARTY.		Ahii Perencena Proyek Intrastruktur	9	SKR00 372 - 2013
			Altā Relayaca Nilai (Naite Engineering)	9	SKXXXX 159 - 2015
		Telorio/Analis	-		
		Operator			
	Komputeri Komputeri	AME.	Menager BIM Musia	7	SKOOT 3 - 2028
	Actionates		Menager EIM Madya	3	SKR3N 3 - 2023
		Televini/Analin	Modeller BBI Mude	*	SEEDNE 3 - 2028
			Modeller BBI Madya	5	SKION 3 - 2028
			Koordinator BBE	5	SKOOT 3 - 2023
		Operator	Junu Gember BM Level 2	2	SKRON 3 - 2028
			Juru Gember BBN	3	SKXXXI 3 - 2023
	Peledalosa	AME	50		
		Televisi, Amelia	-		
		Operator	<u> </u>		

#### BAGAN ALIR PEMBERIAN REKOMENDASI LISENSI LSP Pemohon Rekomendasi Lisensi Tim Pemberian Rekomendasi Lisensi Ketus LPJK Mulai perizinan berusaha melalui OSS RBA rekomendasi lisensi Pemerikseen Kelengkapan LSP melalui Portali Berkas = 3 hari Kerja Perizinan (980) Perbakan Lengkap Kelenakanan Language Benkas 4 5 hari Keria Verifikasi dan Validasi x 3 han Kega x 2 han Raga Berita Acara Veritikasi dan Rapat Pengurus Validasi Persetujuan Pengurus Penyampaian Surat Penerbitan Surat Selecal Rekomendasi Lisensi Rekomendasi Lisensi melalul Portal perizinan Penyampalan Surat enerbitan Surat Penelakan melalui Ponnbikan Portal perizinan







#### KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

A Patterura No. 20 Kebaporan Saru Jakaria Belalan 12112 Telapan (021) 7308116 Faksimii (021) 7221762

#### Yth.

- 1. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
- Para Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
- 3. Ketua Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi;
- 4. Ketua Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi; dan
- 5. Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Bidang Jasa Konstruksi.

#### SURAT EDARAN NOMOR: 214 /SE/Dk/2022 TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN SERTIPIKASI KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI UNTUK JABATAN KERJA YANG BELUM DAPAT DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA SERTIPIKASI PROFESI DAN/ATAU BELUM TERBENTUKNYA PANITIA TEKNIS UJI KOMPETENSI

#### A. Umum

Dalam rungka melaksanakan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Permenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perisinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi perlu menyusun tata cara pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi yang ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi untuk jabatan kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan/atau belum terbentuknya Panitia Teknis Uji Kompetensi (PTUK).

Berkaitan dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Bina Konstruksi selaku pimpinan unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi perlu menetapkan Surat Edaran tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi Untuk Jabatan Kerja yang Belum Dapat Dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan/atau Belum Terbentuknya Panitia Teknis Uji Kompetensi (PTUK).

#### H. Dasar Pembentukan

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Undang-Undang Nemor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nemor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nemor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nemor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 2573);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konatruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konatruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6620);

į.

format. pada angka VI angka 6.2.5;

- Berita Acara Haail Penilaian Uji Kompetensi untuk permohonan SKTK sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 2 huruf u sesuni dengan format pada angka VI angka 6.2.6.
- Format Surat Pemberitahuan hasil uji kompetmus sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 1 huruf z dan angka 2 huruf w dengan format 6.2.7;
- Executive summory sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 1 huruf h angka 11) sesuai dengan format pada angka VII;

tercentum dalam Lampirun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

#### J. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 16 Desamber 4013. DIREKTUR JENDERALJENA KONSTRUKSI

Dr. to Yudho Helmann M Dr. Pig. NIP 1966 103 1992 03 1 004



Berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor 214/SE/Dk/2022

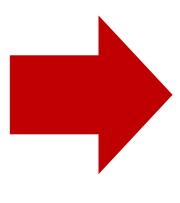
Building Information
Modelling (BIM)
merupakan salah satu
jabatan kerja dalam
rangka mendukung IKN

#### **SE DIRJEN BINA KONSTRUKSI NO. 214 TAHUN 2022**

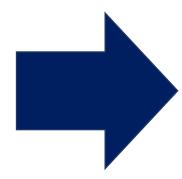


#### V. JABATAN KERJA DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA (IKN)

No	Klasifikasi / Subklasifikasi	Kode	Kualifikasi	Acuan	Persyaratan Pendidikan dan Pengalaman	Program Studi/ Jurusan
	<u> </u>		· Dorre			
1	BIM Manager ** (Setara Jenjang 7 dan 8)	SRK	Ahli Muda	Skema Tim Penyelengg araan atau SKKNI (jika rudah ditetapkan)	Abli Muda:  Pendidikan Profesi Minimal O Tahun S1/S1 Terapan/D4 Terapan Minimal 2 Tahun Abli Madya:  Magister/ Magister/ Magister/ S2/S2 Terapan/Pen didikan Spesialis 1 Minimal O tahun Pendidikan Profesi Minimal S Tahun S1/S1 Terapan/D4 Terapan/D4 Terapan Minimal 6	Seluruh Jurusan/ Program Studi Bidang Konstruks i (*)
					Tahun	
2	BIM Koordinator ** (Setara Jenjang 6)		Terampil 1		S1/S1     Terapan/D4     Terapan     Minimal 0     Tahun     D3 Minimal 4     Tahun     D2 Minimal 8     Tahun     D1 Minimal     12 Tahun	Seluruh Jurusan/ Program Studi Bidang Konstruks i (*)
3	BIM Modeller ** (Setara Jenjang 5)		Terampil 1	Skema Tim Penyelengg araan atau SKKNI (jika sudah ditetapkan)	S1/S1     Terapan/D4     Terapan     Minimal 0     Tahun     D3 Minimal 4     Tahun     D2 Minimal 8     Tahun     D1 Minimal     12 Tahun	
4	Juru Gambar BIM  (Setara Jenjang 3)		Terampil 2		D1/SMK Plus Minimal 0 Tahun     SMK Minimal 3 Tahun     SMA Minimal 4 Tahun     Pendidikan Dasar Minimal 5 Tahun	



Diverifikasi oleh Asosiasi Profesi Terakreditasi sesuai dengan klasifikasinya



Diverifikasi oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah atau mitra

# TERIMAKASIH